



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULAN II 2023



#2023
HKP THRIVE

#PSDKP
SAHABAT
NELAYAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Triwulan II Tahun 2023 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang Triwulan II tahun 2023 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kerjanya, dibuktikan dengan pencapaian seluruh indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan nilai sebesar 115,59%, dengan kategori **“Istimewa”**. Capaian kinerja tersebut selaras dengan realisasi anggaran sebesar 34,79%. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 5 (lima) kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP** yaitu **“Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi”** dan **core value “ASN BerAKHLAK”** mewujudkan PSDKP menjadi **Benteng KKP** yang **Hebat** dalam mengawal **Kebijakan Ekonomi Biru**.

Jakarta, 31 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2023.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Ditjen PSDKP triwulan II Tahun 2023 mencapai **115,59%**, dengan kategori “Istimewa”. Pada triwulan II tahun 2023, sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya, 10 (sepuluh) tercapai melebihi target, 1 (satu) indikator tercapai sesuai target dan 1 (satu) indikator tidak tercapai. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73	48,67	82,74	120
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87%	36	41,98	116,61
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	89,4	89,4	95,78	107,14
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80	66	62,44	94,61
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	55	63,35	115,18
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	50	95,40	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	50	79,11	120
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78	71	74,98	105,61
10	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	75%	75%	95,83%	120
11	Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	92%	92%	95,67%	103,99
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89	80	89,14	111,42

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDKP sampai dengan triwulan II tahun 2023 antara lain: pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, operasional pusat pengendalian, pembangunan prasarana pengawasan SDKP, perawatan sarana pengawasan SDKP serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Selain kegiatan teknis tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PSDKP juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan manajerial antara lain: penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, serta Implementasi program budaya kerja “PILAR” yaitu UPDATE (upayakan data terkini).

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2023 sebesar Rp. 1.151.263.730.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Juni 2023 sebesar Rp. **400.487.143.563**; atau **34,79%**.

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

ii

Ikhtisar Eksekutif

III-1

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

I-1

Bab I
Pendahuluan

IV-1

Bab IV
Penutup

II-1

Bab II
Perencanaan Kinerja

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru, yaitu:

1

Penambahan luas wilayah konservasi perairan .

Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂

2

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan

3

Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.

Mengurangi tekanan sumber daya ikan dilaut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan

4

Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

5

Pembersihan sampah plastik di Laut

Melalui gerakan partisipasi nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

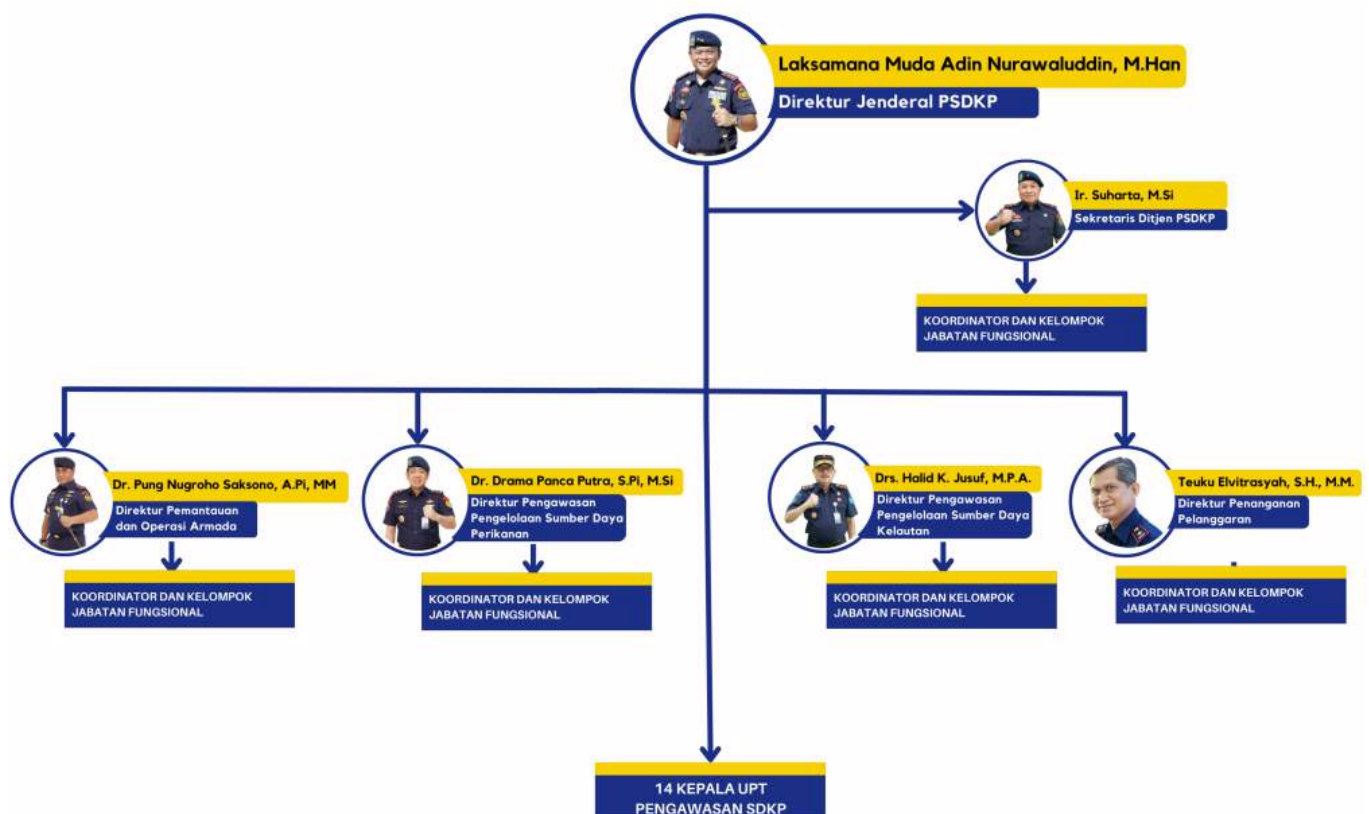
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Pemanfaatan Ruang laut membutuhkan pengawasan secara tegas dalam mengawal kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut baik diwilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi belum memiliki perizinan.
2. Distribusi importasi hasil perikanan tidak sesuai peruntukannya yang mengancam hasil tangkapan nelayan lokal.
3. Pengenaan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan pasca Undang-undang Cipta Kerja. Adapun penindakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
4. Praktik *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).

C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP	BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2023
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023	BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan

fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
Sasaran program Indikator Kinerja		Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat							
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90	
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat							
	Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98	
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif							
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75	
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89	
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas							
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	Persentase	93	93	93	93	93	
Program 2 Dukungan Manajemen								
Sasaran program Indikator Kinerja		Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP							
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34	
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8	
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1	
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76	
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75	
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1	
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3	
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80	
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89	

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terdapat indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana dibahas dibawah ini.

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 22 (dua puluh dua) IKU. Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	-
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	-
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tidak ada	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Persentase kepatuhan <i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP menjadi IKU level 0

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga nomenklatur dan formulasi penghitungannya disesuaikan menggunakan teknologi citra satelit
Tidak ada	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 disajikan Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023

Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	nilai	73
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	87
Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif			
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP	Indeks	89,4
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP	Indeks	80
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif			
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	86
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
9	Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	33,5
10	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang	Indeks	70

	pengawasan SDKP		
11	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	12
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	78
14	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	80,50
15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022	%	≤0,5
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	%	75
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	75
18	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	%	92
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP	Persentase	77,5
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	77,5
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	89
22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP sebesar **115,59%**, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajerial. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73	48,67	82,74	120
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87%	36	41,98	116,61
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	89,4	89,4	95,78	107,14
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80	66	62,44	94,61
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	55	63,35	115,18
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	50	95,40	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	50	79,11	120
9	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	33,5	-	-	-
10	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
11	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	12	-	-	-
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP (level)	3	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78	71	74,98	105,61
14	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	80,5	-	-	-
15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat	≤0,5%	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi	%
	Jenderal PSDKP tahun 2022 (%)				
16	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	75%	75%	95,83%	120
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75	-	-	-
18	Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	92%	92%	95,67%	103,99
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	77,5%	-	-	-
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	77,5%	-	-	-
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89	80	89,14	111,42
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1

KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT

1. IKU 1 Nilai Pemahaman Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDKP Yang Tertib dan Bertanggungjawab

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	73	48,67	82,74	120	113,34	-	-

Indikator kinerja ini ditargetkan pencapaiannya pada triwulan II sebesar 48,67, telah terealisasi 82,74 yang merupakan rerata nilai posttest dari kegiatan penyadartahuan yang telah dilakukan. Adapun nilai diperoleh dari hasil penilaian beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain:

- Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Perairan. Kegiatan dilaksanakan di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 9 Februari 2023. Adapun rangkaian kegiatan adalah Sosialisasi kepada 200 orang yang terdiri dari nelayan, pengguna jasa Pelabuhan Tegalsari, instansi pemerintah dan NGO terkait, Deklarasi Stop Mencemari Laut bersama peserta kegiatan, penyampaian materi oleh perwakilan dari Ditjen PRL, Ditjen PSDKP, LANAL Tegal, DKP Jawa Tengah dan DLH Kota Tegal, Penempelan stiker Stop Cemari laut pada kapal perikanan yang bersandar di Pelabuhan Tegalsari. Pada kegiatan ini, nilai posttest diperoleh dari rerata hasil nilai posttest peserta yaitu 80,83.

- b. Kampanye dan Edukasi Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi. Pada tanggal 15 Februari 2023, pada rangkaian acara kampanye dan edukasi pengawasan pemanfaatan penyu di Morowali, dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan deklarasi stop pemanfaatan penyu sebagai bentuk komitmen Pemda dan masyarakat Morowali untuk bersama-sama memerangi pemanfaatan penyu secara ilegal. Dilaksanakan juga penyerahan piagam penghargaan Dirjen PSDKP kepada 6 instansi yang berperan aktif dalam pelestarian penyu di Kab. Morowali yaitu: MUI, Dinas Perikanan, Polres, Bankespol Morowali, Sombori Diving Club dan Masyarakat Pelestari Penyu Pulau Dua Darat. Adapun nilai posttest sebesar 84,65 yang merupakan rerata nilai posttest dari peserta.

2. IKU 2 Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	87	36	41,98	116,61	48,26	-	-

Beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian telah dilaksanakan antara lain:

- Sosialisasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat Bersama Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI. Dalam kegiatan ini disepakati lokasi serta waktu pelaksanaan penyadartahuan masyarakat khususnya pembinaan POKMASWAS tahun 2023.
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan mengacu pada Perdirjen Nomor 5 Tahun 2021 dan penilaian mengacu pada Perdirjen Nomor 4 Tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pokja Pembina dan Penilai Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023 untuk menyusun rencana pembinaan dan prosedur penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023.



Gambar 1 Rapat Tim Pokja Pembina dan Penilai Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023

- Melakukan pemantauan keaktifan kelompok melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi baik secara online maupun offline.

SASARAN PROGRAM 2

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN EFEKTIF

1. IKU 3. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	98,91%	100%	100%	100%	100	100	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 WPPNRI. Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diperoleh dari hasil pemantauan terhadap aktivitas kapal-kapal di seluruh WPPNRI. Pemantauan menggunakan citra satelit antara lain *Automatic Identification System (AIS)*, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan pemantauan melalui pesawat patroli.

Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan *Vessel Monitoring System (VMS)*, dimana kapal perikanan telah mengajukan dan mengaktifkan transmitter yang terpasang di kapal. Sistem ini hanya ada pada Kapal perikanan yang berbendera Indonesia serta telah mengajukan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Berdasarkan hasil pemantauan melalui SPKP pada periode triwulan II Tahun 2023, Bulan Juni terpantau sebanyak 5.587 kapal yang beroperasi di seluruh WPPNRI, meningkat dari awal hasil pemantauan bulan Maret sebanyak 1.022 kapal dari 4.565 kapal. Peningkatan dikarenakan adanya proses migrasi dari kapal izin daerah menjadi izin pusat sehingga menambah jumlah kapal yang terpasang transmitter SPKP. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal perikanan sepanjang periode triwulan II Tahun 2023, disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Pemantauan Kapal melalui SPKP Triwulan II Tahun 2023

WPPNRI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
571	16	27	36	93	117	93
572	284	270	281	426	429	426
573	308	360	417	525	647	676
711	516	591	710	945	1249	1239
712	1.779	1.826	1.911	2.776	3.091	2.899
713	221	204	129	489	313	572
714	68	104	202	462	213	479
715	238	238	258	381	387	398
716	56	60	80	166	183	193
717	45	52	52	92	97	115
718	1.024	950	759	776	642	901
Total	4.215	4.373	4.565	5.131	5.487	5.587

Sebanyak 18.977 kapal terpantau di Bulan Juni 2023. Kapal yang terpantau adalah semua jenis kapal yang melakukan operasi atau berlayar, tidak hanya Kapal perikanan saja, termasuk juga kapal jenis non perikanan yang melintas di WPPNRI. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal menggunakan AIS disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pemantauan kapal melalui AIS

WPPNRI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
571	687	574	743	789	755	833
572	1197	1252	761	749	1541	1617
573	568	587	646	655	754	784
711	3737	3390	3621	4420	3928	3445
712	3260	3352	3675	3424	3110	4041
713	2416	2168	2785	2139	2097	2129
714	686	709	813	756	749	841
715	3090	1169	1986	1710	2875	1832
716	215	282	252	228	229	210
717	99	83	89	80	92	75
718	2001	1998	2135	1825	1833	2055
Total	19.461	16.023	19.050	17.668	19.634	18.977

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Pemantauan dikawasan konservasi dilakukan untuk memantau kapal-kapal yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut. Pada triwulan II 2023, dilaksanakan pemantauan di 7 (tujuh) kawasan konservasi perairan, 1 (satu) kawasan konservasi, 3 (tiga) KKP3K, 3 (tiga) Suaka Alam Perairan (SAP), 1 (satu) Taman Nasional Perairan (TNP) dan 3 (tiga) Taman Wisata Perairan (TWP). Berdasarkan hasil pemantauan sebanyak 114 kapal beroperasi dibulan Juni 2023. Rekapitulasi hasil pemantauan periode triwulan II tahun 2023 disajikan Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Pemantauan Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2023

WPPNRI	ZONA KONSERVASI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
715	Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Teluk Etna, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	8	3	4	6	4	6
	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat	9	6	10	12	8	3
	Suaka Alam Perairan (Sap) Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	1	2
713	Kawasan Konservasi Perairan Gili Sulat, Gili Lawang, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	1	1		1	1
573	Kawasan Konservasi Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	1	0		1	
	Kawasan Konservasi Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya			2	1	2	
	Taman Nasional Perairan (Tnp) Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	29	17	16	24	5	2
711	Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang Dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						1
	Taman Wisata Perairan (Twp) Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau	17	24	62	60	67	49
572	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa Dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara	1	0	1		9	2
	Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai Di Provinsi Sumatera Barat	5	5	1		5	4
716	Kkp3k Kepulauan Derawan Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	4	7	0		2	4

WPPNRI	ZONA KONSERVASI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
714	Kkp3k Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku	4	0	0	1	1	1
	Taman Wisata Perairan (Twp) Laut Banda Di Provinsi Maluku					1	
712	Kkp3k Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang Di Provinsi Jawa Tengah	25	10	0	12	11	6
718	Suaka Alam Perairan (Sap) Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Maluku	169	115	21	39	50	33
717	Suaka Alam Perairan (Sap) Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	1	0	1	1	1	
	Taman Wisata Perairan (Twp) Kepulauan Padaido Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua	9	6	3	3	1	
TOTAL		282	195	122	159	170	114

Hasil pemantauan diatas, selanjutnya digunakan untuk keperluan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

- Bahan penentuan/pembuatan rencana Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan;
- Bahan penentuan/pembuatan rencana Operasi *Aiborne Surveillance*;
- Bahan untuk pengawasan pencemaran perairan;

Realisasi tahun triwulan II 2023 jika dibandingkan dengan periode triwulan II tahun 2022, naik sebesar 1,09%. Kenaikan tersebut menunjukkan seluruh WPPNRI terpantau seluruhnya menggunakan citra satelit dalam hal ini VMS yang terpasang di Kapal Perikanan. Pada Renstra 2020-2024 indikator kinerja nya adalah Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal fishing* dengan target 75%, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target renstra.

2. IKU 4 Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89,4	89,4	95,78	107,14	107,14	-	-

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu a) Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Indeks Kinerja	Nilai
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	96.36
Speedboat Pengawas	94.48
Pesawat Patroli	96.50
	95.78

Kinerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Ditjen PSDKP memiliki 30 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan di laut serta mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menangkap kapal perikanan apabila terindikasi melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beroperasi di seluruh WPP RI dengan target hari operasi tahun 2023 sebanyak 90 hari Operasi. Penempatan Kapal Pengawas KP tersebar di 14 Pangkalan Pengawasan SDKP diseluruh Indonesia. Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Pada periode triwulan II tahun 2023, rata-rata hari operasi 40 hari operasi dan berhasil memeriksa 2.718 Kapal terdiri dari 2.701 KII dan 17 KIA serta mengawasi WPPNRI seluas 407.788 NM². Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditangkap dan diproses sebanyak 76 kapal terdiri dari 66 KII dan 10 KIA. Seluruh kapal yang ditangkap selanjutnya diproses hukum oleh PPNS Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP. Pada periode triwulan II tahun 2023, rata-rata hari operasi 40 hari operasi dan berhasil memeriksa 2.718 Kapal terdiri dari 2.701 KII dan 17 KIA serta mengawasi WPPNRI seluas 407.788 NM². Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditangkap dan diproses sebanyak 76 kapal terdiri dari 66 KII dan 10 KIA. Seluruh kapal yang ditangkap selanjutnya diproses hukum oleh PPNS Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP.

Kinerja Speedboat Pengawas

Tahun 2023, Ditjen PSDKP mengoperasikan 91 *speedboat* pengawas untuk beroperasi di wilayah laut kurang dari 12 mil serta di kawasan konservasi. Operasional speedboat dilakukan oleh UPT Pengawasan SDKP serta satuan pengawasan dibawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Speedboat yang dimiliki berbagai ukuran antara lain : Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Rubber Boat. Periode Triwulan II Tahun 2023, speedboat pengawas telah beroperasi sebanyak 9 hari operasi dari target 30 hari operasi tahun 2023. Telah memeriksa 1.529 kapal ikan Indonesia dan mengawasi WPPNRI seluas 15.729 NM².

Kinerja Pesawat Patroli

Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli Maritime Patrol Aircraft ATR 42-320. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan selama 80 hari yang meliputi di 10 WPPNRI yakni 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, dan 718 dengan hasil pemantauan sebanyak 510 kapal perikanan (477 kapal Indonesia dan 33 kapal ikan asing) serta 163 Alat Bantu Penangkap Ikan berupa bagan dan rumpon. Hasil pemantauan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapal Pengawas dengan menangkap kapal ikan asing asal Vietnam dan Filipina. Selain itu juga Operasi Pesawat telah memantau 5 Kawasan Konservasi yakni Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas, KKPN Gili Trawangan, Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Mentawai, KKPN Taman Wisata Perairan Laut Banda dan Laut Sawu.

3. IKU 5 Indeks Kinerja Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	66	62,44	94,61	78,05	-	-

a. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan

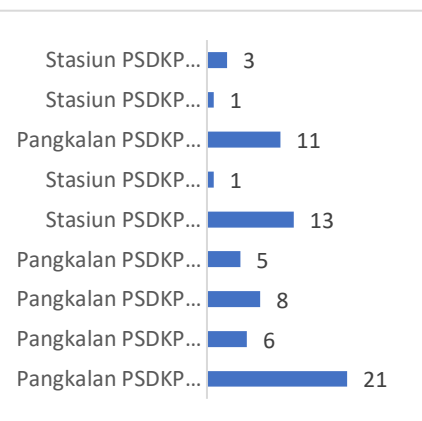
1) Pelaku usaha kelautan

Pada triwulan II Tahun 2023 pelaku usaha kelautan diperiksa/diawasi sebanyak 548 pelaku usaha. Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan yang berada di UPT Pengawasan SDKP dan satuan pengawasan yang tersebar diseluruh Indonesia. Terdapat 9 (sembilan) objek yang dilakukan pengawasan, sebagai berikut :

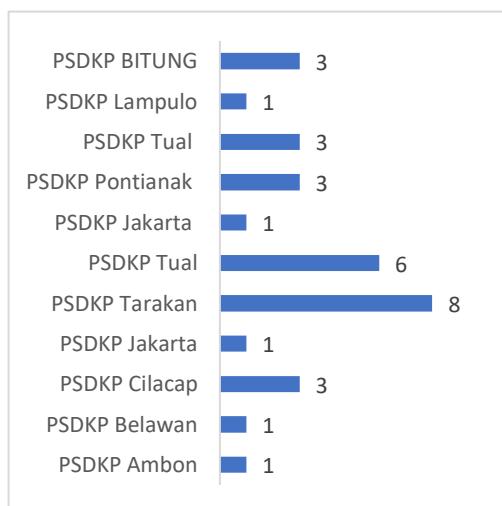
No	Pengawasan	Diperiksa
1	Pemanfaatan pengelolaan Ruang Laut	69
2	Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis	31

	Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
3	Pengusaha Garam	40
4	Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)	8
5	Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA	20
6	Wisata tirta lainnya	17
7	Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan	7
8	Penangkapan Ikan Yang Merusak (Destructive Fishing)	290
9	Pencemaran perairan	66
	Jumlah	548

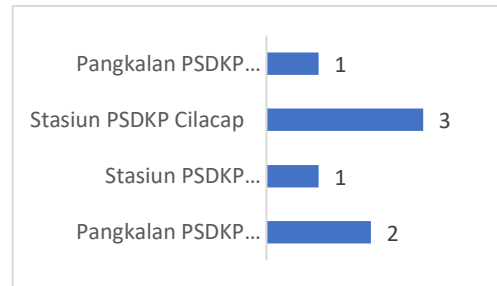
- i. Pengawasan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja 9 (sembilan) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 69 pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak diperiksa pada periode triwulan II adalah di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 21 pelaku usaha. Lokasi pemeriksaan pelaku usaha tersebut berada di Morowali, Konawe Utara, Kolaka, dan Bitung.



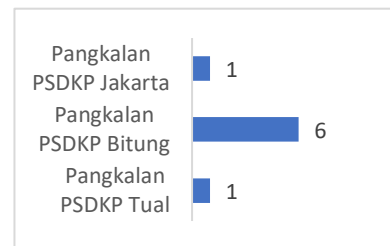
- ii. Pengawasan terhadap pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES di wilayah kerja 11 (sebelas) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 31 pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak diperiksa pada periode triwulan II adalah di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 8 pelaku usaha. Lokasi pemeriksaan pelaku usaha tersebut berada di Nunukan, Banjarmasin, dan Berau.



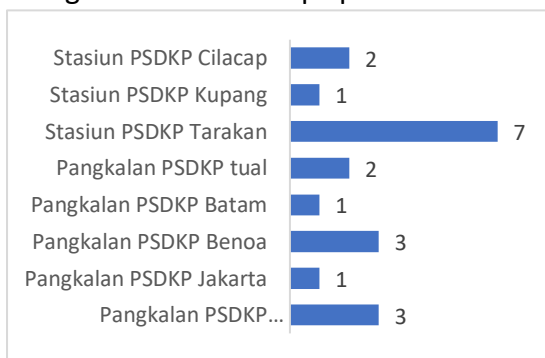
- iii. Pengawasan terhadap pengusaha garam dilakukan terhadap 7 pelaku usaha di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Cilacap, dan Stasiun PSDKP Kupang.



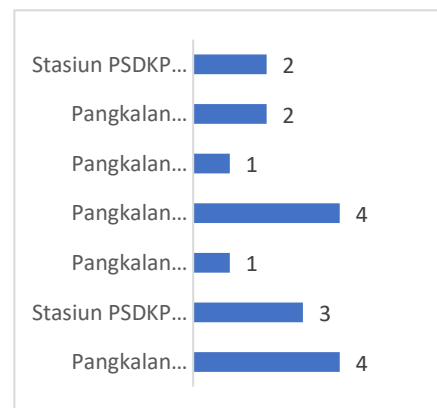
- iv. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi) di wilayah kerja 3 (tiga) UPT Ditjen PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, dan Pangkalan PSDKP Tual. Adapun pengawas berhasil memeriksa 8 pelaku usaha.



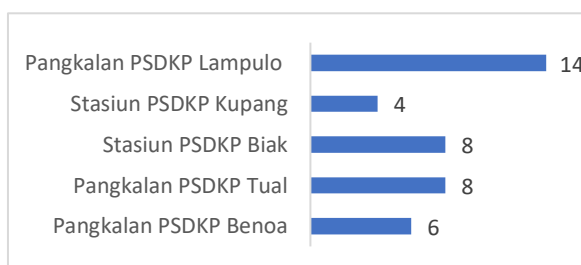
- v. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA di wilayah kerja 7 (tujuh) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 20 pelaku usaha. Pelaku usaha di wilayah Tarakan paling banyak diperiksa pada triwulan II tahun 2023.



- vi. Pengawasan terhadap pelaku usaha wisata tirta lainnya di wilayah kerja 7 (tujuh) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 17 pelaku usaha. Pada triwulan II tahun 2023, pelaku usaha paling banyak diperiksa sebanyak 4 pelaku usaha di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo dan Pangkalan PSDKP Benoa.



- vii. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan di 5 (lima) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa sebanyak 40 pelaku usaha di 5 kawasan konservasi perairan nasional yaitu TNP Laut Sawu, TWP Padaido, TWP Gili Matra, SAP Kep. Raja

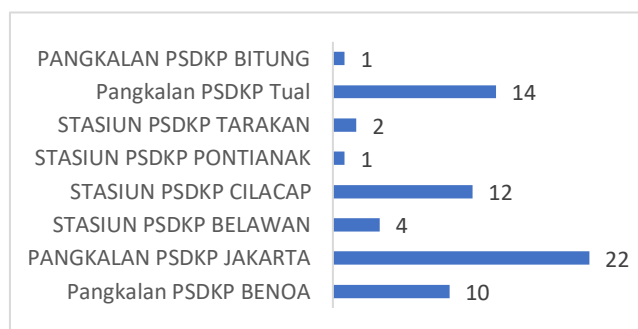


Ampat, dan TWP Pieh. Berdasarkan pemeriksaan di triwulan II Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo paling banyak memeriksa sebanyak 14 pelaku usaha.

- viii. Pengawasan terhadap penanggulanagn *destructive fishing* dilakukan Ditjen PSDKP di 10 UPT Ditjen PSDKP. Adapun pengawasan paling banyak dilakukan di 58 pelaku usaha di Stasiun PSDKP Tarakan.



- ix. Pengawasan Pencemaran perairan di wilayah kerja 8 (delapan) Pangkalan PSDKP. Sampai periode triwulan II ini, Pengawas berhasil memeriksa sebanyak 66 pelaku usaha.



Sampai periode Triwulan II tahun 2023, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan antara lain:

- Pengenaan sanksi administratif, telah dilaksanakan tindakan paksaan pemerintah berupa penyegelan karena tidak memiliki dokumen izin reklamasi dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut diantaranya Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan *breakwater* yang tidak memiliki KKPRL dan izin reklamasi terhadap PT Bumi Rejo Tirta Kencana di Rembang, Jawa Tengah pada 30 Mei 2023.
- Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus PT TIRAN INDONESIA, di Konawe utara Sulawesi Tenggara, pada tanggal 15 Februari 2023;
- Pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah/Penghentian Sementara Kegiatan PT Pulau Bawah di Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 10 Maret 2023,
- Pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan PT Baoshuo Taman Industry Investment (BTII) di Kab. Morowali Sulteng, pada tanggal 16 Maret 2023,



- v. Penerapan Sanksi Administrasi berupa Paksaan Pemerintah (penyegelan) hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan terkait Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah pesisir Batam Kepulauan Riau Milik PT BSSTEC dan PT MPP.



2) Pelaku Usaha Perikanan

Pada triwulan II 2023, jumlah pelaku usaha yang patuh sejumlah 1.719 pelaku usaha dari jumlah yang diperiksa sejumlah 1.817 pelaku usaha. Target tahun 2023, pelaku usaha 2.442 yang akan diperiksa. Hasil pemeriksaan 1817 di mana sebanyak 447 pelaku usaha berasal dari Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan sebanyak 1.370 pelaku usaha berasal dari Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Pasca Produksi. Jumlah tersebut didapat dari 4 subsektor sebagai berikut:

No	Subsektor	Diperiksa
1	Pengawasan penangkapan ikan	1337
2	Pengawasan pengolahan hasil perikanan	138
3	Pengawasan pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan	140
4	Pengawasan pembudidayaan ikan	202
	Jumlah	1817

Pemeriksaan pelaku usaha dilakukan oleh pengawas perikanan di UPT Pengawasan SDKP secara rutin dan tidak rutin (mendukung Penangkapan Ikan terukur), sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa
1	Lampulo	9
2	Batam	67
3	Benoa	77
4	Bitung	24
5	Jakarta	134
6	Tual	74
7	Ambon	18
8	Belawan	32
9	Biak	3
10	Cilacap	63
11	Kupang	2

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa
12	Pontianak	21
13	Tahuna	3
14	Tarakan	12
	Jumlah	539

Terdapat beberapa hal kendala dalam melakukan tugas dan fungsi pada Triwulan II, antara lain:

- Kurangnya pemahaman Pengawas Perikanan terhadap implementasi Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
- Terdapat perbedaan skoring antara Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 dengan aplikasi OSS RBA;
- Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur hingga saat ini belum optimal sehingga pengawasannya juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode Triwulan II Tahun 2023, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

- Melakukan supervisi dan pendampingan pengawasan perikanan secara langsung di lapangan;
- Melakukan Bimbingan Teknis terkait implementasi Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
- Berkoordinasi secara berkala dengan Pengawas Perikanan di UPT PSDKP,
- Berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab kebijakan penangkapan ikan terukur;
- Berkoordinasi dengan BKPM terkait perbedaan format skoring, agar pengisian hasil pengawasan dapat diisi secara langsung pada aplikasi OSS RBA.

Pada periode Triwulan II tahun 2023, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui pengenaan sanksi administratif, telah dilaksanakan tindakan lain berupa penyegelan dan pemasangan *Police Line* terhadap :

- PT. Darwin Karindo Mandiri (DKM) sebagai tindak lanjut ditemukannya ikan impor jenis *frozen pacific mackerel* atau salem sebanyak 19,850 kg di cold storage PT. DKM. Penyegelan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan untuk menjamin ikan impor jenis *frozen pacific mackerel* atau salem tidak diperjualbelikan selama proses berlangsung. Selanjutnya akan dilakukan ekspose kasus penyalahgunaan penjualan ikan impor jenis *frozen pacific mackerel* atau salem yang tidak sesuai peruntukan dalam rangka pembuktian kesalahan dari PT. DKM dan pemberian sanksi administratif.



- ii. Gudang PT. Mulia Satwa Mandiri (MSM) yang berlokasi di Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya, PT. Welindo Erabadi Lojaya (WEL) yang berlokasi di Kabupaten Sekadau-Kalbar, dan Gudang Milik Tjang Se Su yang berlokasi di Kota Singkawang- Kalbar

Penyegelan di Lapangan:

- Jumlah ikan yang masih tersisa di Gudang dan disegel pada PT. MSM berjumlah 145 kotak (1.450 kg) ikan Salem beku / Frozen Pacific Mackarel (*Scomber japonicus*)
- Jumlah ikan yang masih tersisa di Gudang dan disegel pada PT. WEL berjumlah 306 kotak (3.060 kg) ikan Salem beku / Frozen Pacific Mackarel (*Scomber japonicus*)
- Jumlah ikan yang masih tersisa di Gudang dan disegel pada TSS berjumlah 520 kotak (5.200 kg) ikan Salem beku / Frozen Pacific Mackarel (*Scomber japonicus*)

- iii. PT. Singa Segara Indonesia (PT. SSI) sebagai tindaklanjut ditemukannya ikan salem impor yang masuk ke pasar Tradisional Juwana, Kab. Pati Jawa Tengah, yang seharusnya hanya untuk bahan baku industri pemindangan. Jumlah Ikan Salem impor yang disegel ±100 ton di Gudang PT. SSI.



Gambar 5 Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaludin M.Han. melakukan penyegelan PT. SSI di Pati Jawa Tengah

b. Verifikasi Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan

Verifikasi dilakukan terhadap hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh pengawas perikanan. Tujuannya dilakukan Verifikasi untuk memastikan kualitas hasil pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang selanjutnya menetapkan kepatuhan pelaku usaha. Uraian hasil verifikasi sebagai berikut:

1) Kelautan

Pada tahun 2023, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan terdiri dari penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K, efektivitas pelaksanaan sengketa WP3K di luar pengadilan, dan efektivitas pelaksanaan audit tata ruang laut. Adapun verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K adalah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi, pemanfaatan kawasan konservasi nasional, wisata tirta lainnya, ekstraksi garam, reklamasi, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF.

Pada triwulan II, sebanyak 548 pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan 318 pelaku usaha diantaranya atau 76,33 % sudah dilakukan verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pengawasan	Diperiksa	Diverifikasi
1	Pemanfaatan Ruang Laut	69	58
2	Pemanfaatan Ikan Dilindungi / CITES	31	31
3	Kawasan Konservasi Nasional	40	17
4	Reklamasi	8	8
5	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	20	10
6	Wisata Tirta Lainnya	17	16
7	Ekstraksi Garam	7	7
8	<i>Destructive Fishing</i>	290	122
9	Pencemaran Perairan	66	49
Jumlah		548	318

2) Perikanan

Tahapan verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan data dukung hasil pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas Perikanan di UPT Pengawasan SDKP kepada Ditjen PSDKP. Data dukung dinyatakan lengkap apabila melampirkan Surat Pemberitahuan, Surat Tugas, Daftar Pertanyaan, Berita Acara Pemeriksaan, Form Penilaian Kepatuhan Teknis dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi kesesuaian pengisian form Berita Acara Pemeriksaan, Form Penilaian Kepatuhan Teknis sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas perikanan terdapat indikasi ketidaksesuaian maka akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan jenis tindak lanjut yang akan dilakukan.

Tindak lanjut berupa pembinaan dan perbaikan akan diberikan kepada pelaku usaha yang belum memenuhi standar mutu dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko namun bukan termasuk pelanggaran administratif maupun pidana. Tindak lanjut berupa rekomendasi sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.

Laporan hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang dilaporkan periode Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 1.909 laporan. Sebanyak 1.817 laporan telah terverifikasi, di mana sebanyak 447 pelaku usaha berasal dari Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan sebanyak 1.370 pelaku usaha berasal dari Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Pasca Produksi. Sedangkan 92 laporan masih proses pendalaman.

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa	Jumlah Pelaku yang Diverifikasi
1	Lampulo	9	4
2	Batam	67	53
3	Benoa	77	75

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa	Jumlah Pelaku yang Diverifikasi
4	Bitung	24	19
5	Jakarta	134	107
6	Tual	74	64
7	Ambon	18	12
8	Belawan	32	22
9	Biak	3	0
10	Cilacap	63	61
11	Kupang	2	2
12	Pontianak	21	17
13	Tahuna	3	5
14	Tarakan	12	6
	Jumlah	539	447

Hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan berupa 3 jenis rekomendasi akhir yaitu: Telah Memenuhi Syarat (TMS), Pembinaan dan Perbaikan, serta Pengenaan Sanksi. Hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan periode Triwulan II diketahui:

- Telah memenuhi syarat sebanyak 1.709 pelaku usaha;
- Sanksi administratif sebanyak 45 pelaku usaha; dan
- Sebanyak 63 pelaku usaha diberikan rekomendasi pencabutan non likuidasi.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode Triwulan II Tahun 2023, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

- Melakukan supervisi dan pendampingan pengawasan perikanan secara langsung di lapangan; dan
- Berkoordinasi secara berkala dengan Pengawas Perikanan di UPT PSDKP.

4. IKU 6 Indeks Kesiapan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	55	63,35	115,18	79,19	-	-

Capaian Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP diperoleh dari kesiapan sarana sebesar 95,65 dan kesiapan prasarana sebesar 31,05. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan, demikian pula halnya dengan Renstra.

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga laik operasi. Dalam hal ini sarana pengawasan SDKP meliputi Kapal Pengawas kelautan dan Perikanan Kelas I sebanyak 4 Kapal (Orca 01, Orca 02 Orca 03, Orca 04), Kapal Pengawas kelautan dan

Perikanan Kelas II sebanyak 8 kapal (Hiu Macan Tutul 01, Hiu Macan Tutul 02, Paus 01, Hiu Macan 01, Hiu Macan 03, Hiu Macan 04, Hiu Macan 05, Hiu Macan 06), Kapal Pengawas kelautan dan Perikanan Kelas III sebanyak 17 kapal (Hiu 01, Hiu 02, Hiu 03, Hiu 04 , Hiu 05 , Hiu 06, Hiu 07, Hiu 08, Hiu 09, Hiu 10, Hiu 11, Hiu 12, Hiu 13, Hiu 14, Hiu 15, Hiu 16, Hiu 17), Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Kelas IV sebanyak 1 kapal (Akar Bahar) serta Kapal Pengawas Kelas V type speedboat pengawas dengan jumlah 87 Kapal . Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:

- Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*),
- Perawatan prediktif (*predictive maintenance*),
- Perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pemeliharaan dan perawatan pencegahan meliputi kegiatan pemeliharaan dan perawatan rutin, pengedokan atau pelimbugan, servis, analisis teknis, pengecekan. Pemeliharaan dan perawatan rutin merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal yang sifatnya terus menerus dan sistematis dilakukan secara rutin diluar jadwal pengedokan dan dilakukan diatas air. Servis adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu peralatan dan permesinan kapal pengawas yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Servis dilakukan terhadap Peralatan maupun Permesinan kapal.

Penilaian Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP dibatasi hanya bagi prasarana pengawasan utama di UPT PSDKP yaitu: kantor, mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara dan gedung serbaguna.

Target nilai indeks pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 25,30 dan realisasi nilai indeks adalah sebesar 31,05 (deviasi positif). Penilaian kesiapan prasarana pengawasan dilaksanakan di empat UPT Ditjen PSDKP, sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Prasarana Pengawasan	Triwulan II				Bobot	Nilai Indeks
		Benoa	Bitung	Cilacap	Belawan		
1	Pos Pengawasan/Kantor	80	80	80	80	30	6,86
2	Bangunan Operator/Mess		80		80	25	4,44
3	Dermaga		80			20	4,00
4	Gudang		80		80	10	4,00
5	Tempat Penampungan Sementara		80		80	10	2,00
6	Gedung Serbaguna		80			10	4,00
Target							25,30

REALISASI NILAI INDEKS KESIAPAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Jenis Prasarana Pengawasan	Triwulan II				Bobot	Nilai Indeks
		Benoa	Bitung	Cilacap	Belawan		
1	Pos Pengawasan/Kantor	100	100	100	96,43	30	8,49
2	Bangunan Operator/Mess		100		91,88	25	5,33
3	Dermaga		100			20	5,00
4	Gudang		100		95,83	10	4,90

No	Jenis Prasarana Pengawasan	Triwulan II				Bobot	Nilai Indeks
		Benoa	Bitung	Cilacap	Belawan		
5	Tempat Penampungan Sementara		95		91,67	10	2,33
6	Gedung Serbaguna		100			10	5,00
Realisasi							31,05

SASARAN PROGRAM 3

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 7 Indeks Kinerja Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	50	95,40	120	119,08	-	-

Indeks kinerja penanganan pelanggaran Administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil pengenaan sanksi administratif dan kesesuaian penerapan sanksi administratif sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	93,41	70%	65,40
Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif Dengan Peraturan Perundang –Undangan	100	30%	30
			95,40

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Pengenaan sanksi administratif sektor perikanan menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain pengenaan sanksi administrasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- UPT PSDKP/Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang

Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksa);

- d) Dit. PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Capaian indikator kinerja persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 95,40% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 50%. Nilai ini diperoleh dari jumlah pengenaan sanksi administratif berbanding dengan total kasus pelanggaran sanksi administratif. Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan II tahun 2023 ini sebanyak 570 pelanggaran dan total kasus sebanyak 643 pelanggaran. Berikut tabel penyelesaian pengenaan sanksi administratif per triwulan II tahun 202.

Tabel 3.5. Penyelesaian Penanganan Sanksi Administratif 2023

No.	Lokasi Penanganan Perkara	Total Kasus		Kasus Selesai	
		SPKP	Sanksi Adm	SPKP	Sanksi Adm
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	200	19	166	19
2	Pangkalan PSDKP Batam	17	17	8	17
3	Pangkalan PSDKP Lampulo	20	1	18	1
4	Pangkalan PSDKP Benoa	10	0	3	0
5	Pangkalan PSDKP Bitung	19	24	13	24
6	Pangkalan PSDKP Tual	35	4	32	4
7	Stasiun PSDKP Cilacap	243	5	232	5
8	Stasiun PSDKP Tahuna	1	3	1	3
9	Stasiun PSDKP Ambon	0	4	0	4
10	Stasiun PSDKP Tarakan	0	1	0	1
11	Stasiun PSDKP Belawan	1	0	1	0
12	Stasiun PSDKP Pontianak	1	8	1	8
	Jumlah	554	89	481	89
		643		570	

Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif yaitu kesesuaian penerapan sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan adalah penerapan pasal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP yang pertama diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kesesuaian penerapan sanksi administratif dilakukan terhadap 89 Kasus sanksi administratif, dan seluruhnya sudah sesuai.

SASARAN PROGRAM 4

PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 8 Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP)

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024
-	-	-	86	50	79,11	120	91,34	-

Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil penyelesaian penyidikan dan kualitas penyidikan sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	80,77	70%	56,54
Indeks kualitas penanganan Bidang KP	75,25	30%	22,57
			79,11

Penyelesaian penyidikan TPKP

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II). Capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada triwulan II tahun 2023 ini sebesar 80,77%, diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 26 kasus dengan jumlah kasus yang sudah selesai 21 kasus (tahap II 8 kasus, sidang 2 kasus, kasasi 1 kasus, inkraht 10 kasus).

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	TPP / TPK
1	Batam	2	2	2 kasus TPP
2	Bitung	14	14	6 kasus TPP 8 kasus TPK
3	Cilacap	2	2	2 kasus TPP
4	Belawan	3	1	3 kasus TPP
5	Lampulo	4	2	2 kasus TPP 2 kasus TPK
6	Pontianak	1	0	1 kasus TPK
Jumlah		26	21	

Penanganan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada Triwulan II tahun 2023, penanganan kasus terbanyak terjadi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung. Di dalam penanganan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung lebih banyak tindak pidana kelautan yang menggunakan bahan peledak (*destructive fishing*) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Sedangkan pada kasus tindak pidana perikanan terdapat kegiatan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia dan Vietnam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan. Untuk proses penyidikan di Pangkalan PSDKP Batam telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun proses penyidikan terhadap 2 (dua) kapal perikanan asing berbendera Malaysia di Stasiun PSDKP

Belawan masih belum selesai dikarenakan kasus tersebut masuk pada akhir Triwulan II dengan tanggal dimulainya SPDP pada tanggal 12 Juni 2023 dan 19 Juni 2023 sehingga proses penanganannya akan selesai pada Triwulan III sesuai dengan norma waktu proses penyidikan yang diatur dalam hukum acara tindak pidana perikanan.

Kualitas Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata-rata dari indeks perkasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan TPKP pada Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan, persentase supervisi penanganan barang bukti, dan persentase supervisi penanganan awak kapal. Uraian penjelasan sebagai berikut:

a) Supervisi penyidikan

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 17 kasus dari total 26 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 11 kasus dan kelautan 6 kasus. Lokasi supervisi disajikan pada tabel 3.6.



Tabel 3.6. Lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2023

NO	LOKASI SUPERVISI	NAMA TERSANGKA	TAHAPAN PROSES HUKUM	SUDAH SUPERVISI
Tindak Pidana Perikanan				
1	Stasiun PSDKP Belawan	- Khon Kheang - Somsak Prombut - Than Htike	- Sidang Tingkat I - Penyidikan - Penyidikan	V X X
2	Stasiun PSDKP Cilacap	- Sugiyo Nurofik - Riza Garnita	- Inkracht - inkracht	V V
3	Pangkalan PSDKP Bitung	- Glen Artur Sanotan - Edgardo Cabarrubias - Harim P. Salmoro - Angelo Santiago - Wendel Amores - Moktar K. Hambali	- Inkracht - Inkracht - Inkracht - Sidang Tingkat I - Inkracht - Inkracht	V V V V V V
4	Pangkalan PSDKP Batam	- Zaw Tun - Nguyen Van Bay	- Inkracht - inkracht	X X
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	- Muzakir - Jalaluddin M. Jafar	- Tahap II - Tahap II	V V
Tindak Pidana Kelautan				
1	Pangkalan PSDKP Bitung	- Parto Bin Juhaepa dan Ilma bin Jamaludin - Juhaepa bin Abe - Husban bin Alidua - Mirdan bin Hajirin - Mustamin bin POA - Jamil bin Jabir - Hasdin bin Labacu - Asnal Buhari bin	- Kasasi - Inkracht - Tahap II - Tahap II - Tahap II - Tahap II - Tahap II - Tahap II	V V V V X X X X
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	- Rusli Ismail - Daifizal, Burhanuddin Nst, Edi Kandra, Foluzatulun Duha, Erik Adam Nst, Rudi Hartono, dan Arpan	- Penyidikan - Penyidikan	V V
3	Stasiun PSDKP Pontianak	Alan	- Penyidikan	X

b) Supervisi Penanganan Barang Bukti

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan di 5 (lima) lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II). Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) unit. Tahapan pembobotan supervisi penanganan barang bukti adalah:

Tabel 3.7.

Lokasi supervisi tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan II tahun 2023

No	Tahapan Penanganan	Nilai	Jumlah Barbuk	Rata-rata
1	Pengumpulan Data Barang Bukti	20%	-	-
2	Penentuan Lokasi Supervisi Prioritas	40%	5	200
3	Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi Dan Monitoring Penanganan Barang Bukti	95%	2	190
4	Pelaksanaan Penyerahan Barang Bukti	100%	12	1.200
	Total		19	83,68

c) Supervisi Penanganan Awak Kapal

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal Triwulan II tahun 2023 dilaksanakan di 5 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana TPKP, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional. Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku TPKP yang tidak dijadikan tersangka (non justitia) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.



Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 78 awak kapal yang masuk dalam proses hukum, tahapan pembobotan supervisi penanganan awak kapal adalah:

Tabel 3.8.

Tahapan Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023

No	Tahapan Penanganan	Nilai	Jumlah Awak Kapal TPKP	Rata-rata
1	penyerahan tersangka/ bukan tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	10%	-	-
2	pendataan dan penempatan tersangka/ bukan	50%	18	900

No	Tahapan Penanganan	Nilai	Jumlah Awak Kapal TPKP	Rata-rata
	tersangka di tempat yang memadai			
3	merawat dan mengamankan awak kapal/tersangka/bukan tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke Rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke kantor Imigrasi/rudenim	95%	21	1.950
4	tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka warga negara asing (WNA) ke kantor Imigrasi/Rudenim atau pemulangan awak kapal bukan tersangka warga negara Indonesia (WNI)	100%	39	3.900
Total			78	74,07

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. IKM 9 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	33,5	-	-	-	-	34	-

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. IKM 10 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	70	-	-	-	-	-	-

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan monev kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur efektivitas kualitasnya adalah kebijakan

setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP.

Pada tahun 2023 ditargetkan nilai indeks efektifitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan PSDKP sebesar 70. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan II tahun 2023, namun beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain: koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka persiapan kebijakan publik yang akan dilakukan penilaian. Hasil koordinasi dirumuskan hal penting dalam pelaksanaan penilaian yaitu setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)
2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

3. IKM 11 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	12	-	-	-	-	8	-

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2023 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 12 unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2023, ditargetkan 2 unit kerja yang bepredikat WBK yang pencapaiannya akan dilakukan penghitungan pada triwulan IV Tahun 2023. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja antara lain koordinasi secara terus menerus dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

4. IKM 12 Level Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2023 akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV Tahun 2023.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2023. Termasuk supervisi dan pendampingan kepada satker UPT yang diusulkan menjadi wilayah bebas dari korupsi tahun 2023.

5. IKM 13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	62,41	71,63	78	71	74,98	105,61	96,13	76	98,66

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2023 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Memperhatikan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1082/SJ.3/KP.720/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester 1 Tahun 2023, diperoleh hasil nilai IP ASN Ditjen PSDKP Semester 1 Tahun 2023 guna perhitungan capaian Indikator Kinerja IP ASN masing-masing unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Secara kumulatif nilai IP ASN Direktorat Jenderal PSDKP Semester 1 Tahun 2023 adalah 74,98 (melebihi target senilai 71). Selanjutnya akan diupayakan untuk pencapaian target IP ASN masing-masing unit kerja pada Semester 2 Tahun 2023 senilai 78.

6. IKM 14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80,5	-	-	-	-	87,75	-

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2023 belum dilakukan pengukuran, sehingga nilainya belum ada. Penilaian akan dilakukan terhadap komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja. Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- a. Perencanaan kinerja. Dialog kinerja pimpinan lingkup Ditjen PSDKP, Rapat Kerja Teknis Pengawasan SDKP; Penyusunan rencana kerja 2023, Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja level 2, penyusunan manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- b. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2022 dan pengisian capaian aplikasi kinerjaku, input data kinerja dan capaian triwulan I tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- c. Pelaporan Kinerja. Rekonsiliasi laporan kinerja tahun 2022 lingkup Ditjen. PSDKP, Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Triwulan.

7. IKM 15 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2022

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	>0,5	-	-	-	-	-	-

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2022 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan belum diterbitkan oleh BPK sehingga di periode triwulan II 2023, belum ada capaian.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu monitoring reguler atas pengelolaan anggaran minimal setiap triwulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSDKP baik pada unit kerja Ditjen PSDKP Pusat maupun Dekonsentrasi. Selain itu juga dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dokumen pertanggungjawaban keuangan ke lokasi yan di sampling.

8. IKM 16 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
89,80	93,01	95,10	75	75%	95,83%	120	120	80	120

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2022. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, revidi dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Hingga 31 Juni 2023 dari 72 rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga tuntas sebanyak 69 rekomendasi.

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja diantaranya ¹⁾ melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ²⁾ selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait ³⁾ monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	7	7	100,00%	0	0,00%
2	BRSDMKP	198	182	91,92%	16	8,08%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	178	155	87,08%	23	12,92%
4	Ditjen PSDKP	72	69	95,83%	3	4,17%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	184	171	92,93%	13	7,07%
6	Ditjen PRL	223	203	91,03%	20	8,97%
7	Ditjen PDSPKP	56	52	92,86%	4	7,14%
8	BKIPM	175	168	96,00%	7	4,00%
9	Itjen	39	35	89,74%	4	10,26%
TOTAL		1132	1042	92,05%	90	7,95%

9. IKM 17 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	75	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

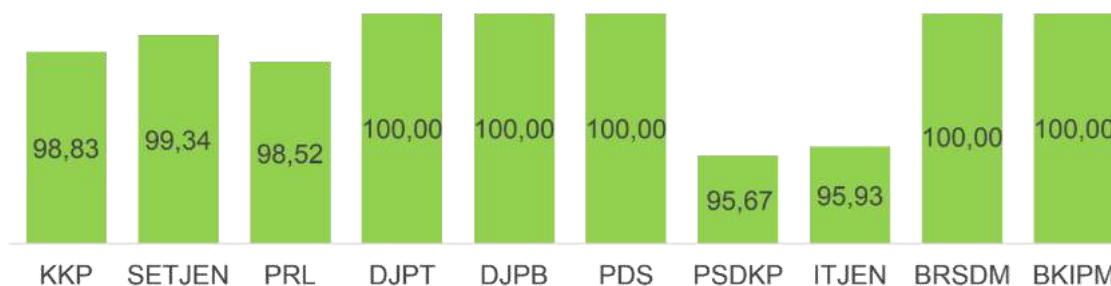
Sehingga ditetapkan kriteria Inovasi adalah memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Sampai dengan triwulan II 2023 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2023.

10. IKM 18 Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
99,06	99,06	98,11	92	92%	95,67%	103,99	13,99	92	107

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 95,67% yang diperoleh dari 2 komponen yaitu pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



11. IKM 19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	77,5	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Sampai dengan triwulan II 2023 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2023.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2023, penginputan data kedalam aplikasi SIRUP, pemantauan progres

pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan, Input pencatatan pengadaan BJ yang sudah dilaksanakan di LPSE.

Pengisian kertas kerja revidi Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan 2, Membahas dan mengusulkan rekomendasi PBJ produk impor dan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibawah 25% TA 2023 tahap III sesuai Nota Dinas Nomor 776/PSDKP.1/PL.420/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 27 produk dan tahap IV sesuai Nota Dinas Nomor 1043/PSDKP.1/PL.420/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 13 produk, kegiatan monitoring dan evaluasi PBJ, Sirup, dan TKDN yang dilakukan setiap bulan dengan nilai realisasi PBJ s.d Triwulan 2 sebesar 31,35% atau sebesar Rp297.654.872.618 dari total PBJ sebesar Rp949.320.030.800. Total Pembayaran PDN pada aplikasi SAKTI sebesar 38,1% atau sebesar Rp216.805.685.545 dari total pembayaran sebesar Rp569.065.521.590. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tata cara menghitung dan perekaman TKDN dalam belanja negara pada aplikasi SAKTI Lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2023

12. IKM 20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	77,5	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN, ²⁾ ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penghitungan kinerja ditetapkan tahunan, sehingga periode trwulan II tidak ada capaian. Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu :

- Telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Palembang (Satwas Palembang, Pangkalan PSDKP Batam), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Wilker Tasik Agung. Stasiun PSDKP Cilacap) , Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Satwas Banjarmasin dan Wilker Batulicin, Stasiun PSDKP Tarakan) serta Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru (Satwas Kotabaru, Stasiun PSDKP Tarakan)
- Telah dilaksanakan pemusnahan BMN berupa ATB pada Direktorat POA pada bulan Juni 2023 sesuai dengan BA Pemusnahan Nomor B.3637/PSDKP.1/PL.750/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023. (proses penerbitan SK Penghapusan)

- c. inventarisasi terhadap aset dengan nilai buku Rp0,00 (Nol rupiah) sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.3018/PSDKP.1/PL.760/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 pada Pangkalan PSDKP Jakarta
- d. Telah dilaksanakan inventarisasi terhadap 3 (tiga) bangunan yang terletak di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
- e. Penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2023 dilaksanakan pada 11 s.d 14 Juli 2023.
- f. Telah dilakukan inventarisasi kembali dan penyusunan dokumen terkait penatausahaan BMN pada DKP Provinsi Papua, DKP Provinsi Gorontalo dan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- g. Telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Kanwil Aceh pada 1 (satu) unit Kapal FV STS-50 senilai Rp7.623.265.000 yang diusulkan untuk dihapuskan.

13. IKM 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89	80	89,14	111,42	100,16	80	111,42

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2023 sebesar 89,14 dari target 80.

14. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% thd TW II 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	-	-	-	-	89	-

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2023 belum dilakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak ada nilai yang disajikan.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian agar diperoleh nilai optimal nilai

kinerja anggaran tahun 2023, antara lain:

- a. Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
- b. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;
- d. Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;
- e. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
- f. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

C. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan triwulanan, namun dihitung tahunan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2023 sebesar **Rp. 1.151.263.730.000,-**. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Juni 2023 sebesar Rp. **400.487.143.563**; atau **34,79%**. Rincian

anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2023, melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

NO	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Direktorat POA	494.674.299.000	145.529.834.322	29,42
2	Direktorat PPSDK	8.235.790.000	2.860.367.298	34,73
3	Direktorat PPSDP	7.850.000.000	1.366.449.673	17,41
4	Direktorat PP	6.868.400.000	1.462.305.830	21,29
5	Sekretariat DITJEN. PSDKP	121.584.885.000	41.880.975.141	34,49
6	UPT PSDKP	505.473.857.000	206.353.964.665	40,81
7	Dekonsentrasi	6.576.499.000	1.033.246.634	15,71
TOTAL		1.151.263.730.000	400.487.143.563	34,79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan indikator kinerja yang pada tahun 2022 memiliki 18 indikator kinerja menjadi 22 indikator kinerja. Perubahan ini tentunya sudah melalui pembahasan secara mendalam dilingkungan Ditjen PSDKP dengan memperhatikan kebijakan Kementerian kelautan dan perikanan serta manajemen kinerja yang ditetapkan.

Pada triwulan II Tahun 2023, dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya, hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu indeks kinerja pengawasan SDKP. Namun secara keseluruhan nilai kinerja organisasi sebesar **115,59%**. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi sebesar **34,79%**.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan khususnya untuk indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu Menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha kelautan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73
		2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SP1.2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	3. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
		4. Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	89,4
		5. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		6. Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80
SP1.3	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	7. Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
SP1.4	Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	8. Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan (indeks)	86
PROGRAM 2. DUKUNGAN MANAJEMEN			
SP2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	9. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	33,5
		10. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70
		11. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	12
		12. Level Maturitas SPIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78
		14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,5
		15. Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2022 (%)	≤0,5
		17. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		18. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	89
		23. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	823.000.000.000
SP1.1	<i>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
SP1.2	<i>Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan efektif dan efisien</i>	
2.	Program Dukungan Manajemen	328.263.731.000
SP2.1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</i>	
TOTAL ANGGARAN		1.151.263.731.000

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



#2023
#KKP THRIVE

#PSDKP
SAHABAT
NELAYAN